Vol. 3 No. 2 (2026)
DOI: https://doi.org/10.61166/classroom.v3i2.62
ISSN: 3063-9050
pp. 200-213

Classroom
Journal of Islamic Education
STIT AT-TAQWA Ciparay Bandung
HELLOW PUSTAKA PENERBIT
ISSN : 3063-9050
http://classroom.hellowpustaka.id

Research Article

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Mewujudkan Karakter Religius Di SMK Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan

Muhammad Safari, Sahya Anggara, dan Masduki A. Sayuti

Universitas Islam Depok, Indonesia
Corresponding Author, Email: dimaswahyuramadhan28102005@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Classroom: Journal of Islamic Education**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : July 09, 2026
Revised : August 15, 2026
Accepted : September 17, 2026
Available online : October 30, 2026

How to Cite: Muhammad Safari, Sahya Anggara, & Masduki A. Sayuti. (2026). Implementation of Islamic Religious Education to Foster Religious Character at SMK Islam Wijaya Kusuma, South Jakarta. *Classroom: Journal of Islamic Education*, 3(2), 200–213. https://doi.org/10.61166/classroom.v3i2.62

Implementation of Islamic Religious Education to Foster Religious Character at SMK Islam Wijaya Kusuma, South Jakarta

Abstract. This research is motivated by concerns over the trend of moral degradation and the crisis of manners (adab) among contemporary urban youth, which triggers a religious cultural gap where routine worship practices at school (such as congregational Dhuha prayers) are trapped in the formality stage of merely fulfilling an obligation. This study aims to deeply analyze and evaluate the process, obstacles, and success rate of implementing the policy for instilling religious character in students through the analytical lens of the six-variable model of Donald Van Meter and Carl Van Horn's theory. The research method used is a qualitative approach with a descriptive analysis type. Field data collection was gathered objectively through source and method triangulation techniques, combining the results of environmental observations, document reviews, and structured interviews with key informants. The results show that the target standards for religious character building have been transparently formulated and converted into a vocational professional ethics (soft skills)

program. Bureaucratic characteristics are managed optimally through the coordination of key school human resource departments by the Principal, supported by a communication network with parents. However, the evaluation detected several limitations in the field, such as the size of the ablution (wudhu) area and religious financial budgeting that still needs to be covered by student self-funded contributions. This study concludes that although faced with the obstacles of external urban environmental conditions in the form of the economic busyness of lower-middle-class parents and the negative impact of gadgets (smartphones), the program remains stable due to the high disposition commitment of Islamic Religious Education (PAI) teachers and the exemplary real actions (uswah hasanah) of the Principal who also attends religious activities such as congregational prayers. Through the enforcement of educational duty sanctions, which are rated as 95% very firm, students' motivation for worship is proven to be successfully institutionalized.

Keywords: Policy Implementation, Van Meter & Van Horn, Islamic Religious Education, Religious Character, Vocational.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap tren degradasi moral dan krisis adab remaja perkotaan masa kini, yang memicu kesenjangan budaya religius di mana pembiasaan ibadah rutin di sekolah (seperti Shalat Dhuha bersama) terjebak pada tahapan formalitas pengguguran kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara mendalam mengenai proses, hambatan, serta tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penanaman karakter religius peserta didik melalui pisau analisis 6 variabel model teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analisis. Pengumpulan data lapangan dihimpun secara objektif melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yang mengombinasikan hasil observasi lingkungan, telaah dokumen serta wawancara terstruktur bersama informan-informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar sasaran pembentukan karakter religius telah dirumuskan secara transparan dan dikonversi menjadi program etika profesi kejuruan (soft skills). Karakteristik birokrasi dikelola optimal melalui pengkoordinasian bagian-bagian penting sumber daya manusia sekolah oleh Kepala Sekolah, didukung jaringan komunikasi bersama orang tua murid. Namun, evaluasi mendeteksi adanya keterbatasan-keterbatasan di lapangan, seperti ukuran tempat wudhu serta penganggaran keuangan keagamaan yang masih perlu ditutup iuran swadaya siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dihadapkan pada hambatan kondisi lingkungan eksternal urban berupa kesibukan ekonomi orang tua menengah ke bawah dan dampak negatif gawai (handphone), program tetap berjalan stabil berkat tingginya komitmen disposisi guru PAI serta keteladanan tindakan nyata (uswah hasanah) Kepala Sekolah yang turut hadir pada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah. Melalui aktivitas penegakan sanksi piket edukatif yang dinilai 95% sangat tegas, motivasi beribadah siswa terbukti berhasil ditradisikan secara optimal dari keterpaksaan aturan menjadi kesadaran spiritual yang mandiri (self-awareness) untuk tetap istiqamah menjalankan ritual ibadah dan memunculkan karakter yang religius dan akhlak mulia secara sukarela baik ketika di sekolah maupun saat di luar sekolah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Van Meter & Van Horn, Pendidikan Agama Islam, Karakter Religius, Vokasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) di era digital saat ini memegang peranan krusial sebagai fondasi pembangunan moralitas bangsa (Harahap 2025: 424). Urgensi penanaman karakter religius di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kian mendesak karena lulusan vokasi tidak hanya dituntut menguasai keterampilan teknis (*hard skills*), melainkan wajib memiliki etika profesional (*soft skills*) berbasis nilai moral di dunia kerja (Sartika Septi Budi dkk., 2022: 73). Namun, fokus pragmatis

pada keahlian praktis di SMK sering kali meminggirkan aspek spiritualitas menjadi sekadar tempelan administratif. Kajian sosiologis merekam adanya tren degradasi moral dan krisis tata krama remaja urban perkotaan akibat hantaman internet negatif, yang menuntut adanya usaha intervensi kultur sekolah secara sistematis (Zubaidi dkk., 2022: 113).

Di SMK Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan, tantangan tersebut mewujud dalam bentuk kesenjangan (*gap*) operasional, di mana pembiasaan ritual keagamaan (seperti Shalat Dhuha bersama) disinyalir masih terjebak pada tahap formalitas lahiriah atau pengguguran kewajiban belaka. Guna memecahkan masalah ini, diperlukan evaluasi kritis menggunakan kacamata kebijakan publik (Nugroho, 2011, hlm. 210). Studi ini menerapkan Model Implementasi Teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan program melalui enam variabel struktural, yaitu standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan, serta disposisi implementor (Tachjan, 2006: 85). Penataan ini diharapkan mampu mengubah paradigma "belajar tentang agama" menjadi gerakan "belajar untuk beragama" secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis untuk menangkap makna, persepsi, dan motivasi batin para aktor pelaksana di lapangan (Abdussamad, 2021, hlm. 112; Sari dkk., 2023, hlm. 89). Riset bertempat di SMK Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan, dengan fokus objek karakter siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Data primer dihimpun secara objektif melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama informan-informan kunci, yang terdiri dari Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, guru Pendidikan Agama Islam (PAI), serta perwakilan peserta didik aktif.

Triangulasi metode diperkuat melalui teknik observasi partisipatif lingkungan peribadatan dan teknik studi dokumentasi terhadap arsip Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), Rencana Kerja Sekolah (RKS), draf Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta Modul Ajar PAI (Dewi, 2022, hlm. 98; Hardani dkk., 2020, hlm. 150). Analisis data kualitatif dijalankan melalui tahapan reduksi data, penyajian data naratif makro-universal, hingga penarikan kesimpulan yang akuntabel (Abdul Mukhyie, 2023, hlm. 45; Kusumastuti & Khoiron, 2019, hlm. 110).

Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy Standards and Objectives*)

Variabel hulu dalam model implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum di tingkat akar rumput ditentukan secara mutlak oleh tingkat kejelasan draf standar dan tujuan program agar tidak memicu ambiguitas atau multitafsir di antara para pelaksana garda depan (Anggara, 2014, hlm. 142). Kehadiran instruksi hukum tertulis yang eksplisit bertindak sebagai pemandu arah sekaligus batasan yuridis yang mengikat komitmen para implementor harian. Temuan lapangan di SMK Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan membuktikan bahwa variabel indikator ini telah dipenuhi secara sangat matang

melalui pelembagaan visi, misi, dan tujuan sekolah secara eksplisit serta tertulis di dalam dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) serta Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). Pihak manajemen puncak menetapkan draf sasaran makro yang terukur untuk membentuk dan mencetak profil lulusan kesiswaan yang shalih, jujur, disiplin, berakhlak mulia, santun, bertanggung jawab, serta taat pada seluruh ajaran agama Islam. Kejelasan rumusan standar ini bertindak sebagai fondasi hulu yang meminimalisir timbulnya kelonggaran interpretasi operasional di lingkungan internal dewan guru.

Sasaran makro yang diidealkan oleh pihak sekolah tersebut kemudian diselaraskan secara cerdas, taktis, dan adaptif dengan struktur kurikulum nasional pemerintah melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) (Satispi & Mufidayaiti, 2019, hlm. 156). Di tingkat operasional kurikulum, bidang kesiswaan memanfaatkan kedaulatan Kurikulum Merdeka, khususnya pada muatan dimensi pertama mengenai "Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia", sebagai payung hukum baku untuk melegalkan keseluruhan program pembiasaan ibadah ritual wajib harian. Visi besar ini diturunkan menjadi petunjuk teknis operasional baku yang meliputi pelaksanaan shalat dhuha bersama di masjid atau di halaman sekolah, mengaji/tadarus harian selama 15 menit setiap pagi sebelum belajar dimulai, dzikir setelah shalat, bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ), mentoring keagamaan, serta penegakan tertib berbusana syariah bagi siswi (seperti wajib menggunakan ciput dan rok yang tidak ketat). Rangkaian indikator capaian karakter ini ditanam secara presisi ke dalam perangkat instrumen Modul Ajar dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk dikonversi menjadi draf etika profesi kejuruan (*soft skills*) pasar kerja (Situmorang, 2016, hlm. 182).

Konversi nilai spiritual menjadi etika profesional vokasi ini dirancang secara terstruktur guna merespons tuntutan riil Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang menghendaki lulusan SMK memiliki integritas moral tinggi di lingkungan kerja. Manajemen sekolah mematok target yang jelas, di mana materi teori kelas tidak boleh berdiri terfragmentasi dari perilaku nyata (amal) siswa sehari-hari. Sebagai contoh, nilai-nilai teologis tepercaya seperti jujur, adil, amanah, dan kesantunan sosial ditransformasikan menjadi indikator etika profesi kejuruan saat siswa melaksanakan praktik di laboratorium sekolah. Integrasi ini diatur secara tertib melalui alokasi Jam Pelajaran (JP) PAI sebanyak 3 JP per kali pertemuan tatap muka, yang disusun elastis agar ketuntasan materi kompetensi keagamaan dapat tercapai secara simultan tanpa mengorbankan menit belajar produktif teknik siswa. Rumusan standar kurikulum yang padu ini diposisikan sebagai motor penggerak kecerdasan moral guna mengikis gejala krisis adab remaja urban metropolitan.

Namun demikian, analisis kritis kualitatif melalui sirkuit standar kebijakan Van Meter dan Van Horn mengungkap adanya draf dinamika operasional terkait transmisi dan kejelasan petunjuk sanksi bagi pelanggar aturan ibadah harian. Meskipun dokumen SOP kedinasan sekolah telah menetapkan pembagian wewenang yang kolaboratif antara koordinator kesiswaan, guru PAI, wali kelas, dan guru BK, peneliti mengidentifikasi adanya variasi tindakan di lapangan yang memicu

kelonggaran interpretasi sanksi. Di satu dimensi, tim kesiswaan menerapkan sanksi langsung yang tegas berupa kewajiban berdiri hormat di tengah lapangan sekolah sampai bel masuk berbunyi atau dijemur di tengah lapangan khusus bagi anak yang nekat bolos shalat berjamaah. Namun di dimensi lain, sebagian pelaksana garda depan mempraktikkan sanksi yang lebih lunak berupa teguran lisan, menyuruh segera shalat, atau penugasan menulis draf surat Yasin atau surah Al-Baqarah di ruang piket. Variasi ini menandakan bahwa meskipun isi kebijakan makro sekolah dinilai 95% sangat konsisten dan berwibawa, penyelarasan standar operasional penjatuhan sanksi harian di ruang piket masih memerlukan penataan evaluasi berkala agar tidak memicu inkonsistensi perlakuan di mata peserta didik.

Sumber Daya (*Resources*)

Variabel kedua dalam kerangka berpikir Donald Van Meter dan Carl Van Horn berasumsi bahwa kejelasan standar dan sasaran kebijakan akan kehilangan daya eksekusi di lapangan apabila tidak ditopang oleh kecukupan pasokan sumber daya (*resources*), baik yang bersifat finansial, fisik, maupun ketersediaan manusia (Kasmad, 2013, hlm. 71). Walaupun draf instruksi hukum telah dirancang secara baku, program pembentukan karakter religius akan mengalami kelumpuhan operasional jika para implementor garda depan tidak dibekali komponen logistik penunjang yang memadai. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa porsi alokasi bahan baku material bertindak sebagai bahan bakar material utama yang mendikte ambang batas kemampuan institusi. Di SMK Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan, pengelolaan variabel pengerahan daya dukung materiil ini secara umum dikelola secara institusional guna menyediakan stabilitas energi bagi kelancaran seluruh rangkaian program karakter di bawah.

Menakar dimensi Sumber Daya Manusia (SDM), pihak manajemen sekolah telah memfasilitasi penugasan pengajaran secara proporsional melalui penataan beban mengajar dua orang guru PAI yang memiliki kualifikasi sarjana keagamaan linier. Jumlah kuantitas staf pengajar ini dinilai sangat ideal dan mencukupi untuk melayani seluruh rombongan belajar kesiswaan. Guna meningkatkan porsi kualitas kompetensi dan skill pengelolaan kelas, para pendidik secara rutin difasilitasi untuk mengikuti bimbingan forum pelatihan pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI DKI Jakarta Selatan yang diselenggarakan berkala setiap 6 bulan sekali (Yayuk & Haqqi, 2023, hlm. 82). Ketepatan penataan SDM ini diperkuat oleh pembatasan alokasi Jam Pelajaran (JP) PAI yang diatur tertib sebanyak 3 JP per kali pertemuan tatap muka, yang disusun elastis oleh kurikulum agar materi esensial teori kelas dan kegiatan praktik keagamaan harian berjalan seimbang.

Menakar dimensi Sumber Daya Fisik (Sarana Prasarana), investasi material dari manajemen puncak bermanifestasi secara konkrit pada penyediaan fasilitas masjid sekolah yang bersih, layak guna, serta dilengkapi fasilitas pendingin udara (AC) yang sangat nyaman (Andriani dkk.). Kenyamanan fisik sarana tempat ibadah ini diakui secara luas oleh kelompok sasaran sukses menumbuhkan rasa tenang, senang, dan khusyuk dalam mendalami ilmu agama. Modernisasi prasarana juga merambah ruang kelas teori melalui pemenuhan fasilitas digital berupa perangkat proyektor LCD dan

internet nirkabel yang dimanfaatkan dewan guru untuk memodifikasi media syiar agar interaktif merespons tren zaman remaja. Pihak Yayasan juga andal menyuplai ketersediaan inventaris keagamaan baru termasuk mushaf Al-Qur'an guna mendukung marwah ketuntasan target hafalan Juz 30.

Namun demikian, analisis evaluasi kritis kualitatif melalui pelacakan arus bawah menemukan adanya beberapa draf hambatan logistik dan keterbatasan material pada unit terkecil akar rumput (Alamsyah, 2016, hlm. 89). Pada dimensi Sumber Daya Finansial, draf pendanaan yang dikunci oleh manajemen sekolah di dalam dokumen RKAS nyatanya baru mampu mendanai sebesar 70% dari total kebutuhan operasional kegiatan keagamaan luar kelas. Hambatan kekurangan anggaran sebesar 30% tersebut memaksa tim pelaksana di bawah mempraktikkan strategi pengorbanan swadaya memanfaatkan subsidi silang kotak uang amal anak-anak yang dihimpun rutin setiap hari Jum'at. Keterbatasan fisik juga ditemukan pada prasarana penunjang tempat wudhu khusus perempuan yang dinilai berukuran terlalu kecil. Keterbatasan kapasitas fisik bersuci ini memicu antrean panjang siswi yang berisiko memotong efisiensi ketepatan waktu shalat berjamaah. Temuan kritis ini melahirkan catatan penting yang menuntut Kepala Sekolah untuk meningkatkan komitmen anggaran keagamaan di RKAS mendatang menjadi 100% penuh tanpa membebani keuangan swadaya amal, serta mendanai renovasi fisik perluasan sarana wudhu perempuan (Rantung, 2024, hlm. 114).

Hubungan Antarorganisasi (*Inter-organizational Communication*)

Variabel ketiga dalam kerangka implementasi sempurna Donald Van Meter dan Carl Van Horn menegaskan bahwa keberhasilan penegakan sebuah program menuntut akurasi sistem penyampaian informasi dan jalinan komunikasi antarorganisasi berjalan secara efektif agar pesan bergerak tanpa hambatan atau distorsi makna (Pramono, 2020, hlm. 83). Van Meter dan Van Horn berasumsi bahwa ketiadaan bias informasi di antara para aktor pelaksana harian menjadi pilar penentu agar tidak terjadi deviasi interpretasi atau standar ganda di lapangan. Di SMK Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan, pemenuhan pilar komunikasi internal ini dikelola secara mekanis dan masif melalui jalinan koordinasi yang dipimpin langsung oleh jajaran manajemen puncak. Langkah strategis penyelarasan persepsi kedinasan ini diturunkan secara hierarkis oleh pimpinan melalui forum rapat kerja resmi, rapat dewan guru awal bulan, penyampaian dokumen tertulis program keagamaan, serta sesi briefing rutin bulanan dewan guru (Satispi & Taufiqurokhman, 2018).

Penyelarasan alur koordinasi horisontal di tingkat birokrasi sekolah dikunci secara formal lewat kewajiban penyusunan draf pelaporan berkala mengajar mengenai perkembangan pembiasaan karakter serta pengisian instrumen nilai rapor sikap spiritual siswa per semester. Evaluasi ketuntasan sikap spiritual tersebut diatur secara mekanis dengan menggunakan parameter kuantitatif range skala nilai 1-10. Melalui interaksi pelaporan yang terstruktur ini, guru PAI secara aktif mengomandani komunikasi terkait kendala perilaku siswa kepada Wali Kelas maupun Guru BK untuk dijadikan bahan evaluasi dalam rapat manajemen. Walaupun analisis kualitatif mendeteksi adanya celah fragmentasi komunikasi horisontal kecil di dalam kelas, di

mana wali kelas perlu menambah durasi koordinasi mendalam secara dua arah ke guru agama terkait pemantauan berkala harian perilaku siswa, sistem komunikasi kedinasan ini dinilai tetap andal memelihara marwah aturan sekolah.

Selanjutnya, pada lapis penyampaian maklumat keagamaan dari guru kepada siswa selaku objek kebijakan, aktivitas penegakan (*enforcement activities*) dijalankan secara 95% sangat konsisten memanfaatkan multisaluran yang luas dan proaktif. Pesan kedisiplinan beribadah massal harian ditransmisikan secara kontinu, baik disebarkan secara digital lewat grup WhatsApp kelas oleh wali kelas, diingatkan langsung tatap muka di kelas, diumumkan saat upacara, memanfaatkan media sosial sekolah, hingga dihimbau secara lisan lewat corong mikrofon pengeras suara di ruang piket sekolah. Guru piket harian memanfaatkan pengeras suara tersebut untuk memanggil setiap kelas secara menyeluruh agar segera bergerak menuju tempat ibadah secara tepat waktu. Ajakan beribadah dari dewan guru dinilai oleh perwakilan kelompok sasaran selalu disampaikan dengan bahasa yang jelas, luas, sangat mudah dipahami, dan dijelaskan dengan baik, sehingga mempermudah fokus ketaatan peserta didik tanpa memicu kebingungan.

Sirkuit komunikasi di SMK Islam Wijaya Kusuma juga membuka ruang umpan balik (*feedback*) dua arah yang demokratis, di mana pihak sekolah secara berkala menyerap aspirasi dan keluhan siswa mengenai jalannya kegiatan keagamaan melalui penyediaan instrumen kotak aspirasi, link pengisian file digital, serta media lain yang diatur sekolah. Hebatnya, jaringan kemitraan inter-organisasi ini meluas secara inklusif ke luar gerbang sekolah bersama Komite Sekolah dan paguyuban orang tua murid melalui prinsip keterbukaan informasi sejak awal tahun ajaran baru. Bidang kehumasan sekolah memanfaatkan grup WhatsApp orang tua untuk rajin membagikan dokumentasi konkrit hasil monitoring amalan ibadah anak di sekolah, yang melahirkan dukungan publik yang sangat tinggi (Pakpahan, 2021, hlm. 95). Wali murid secara kolektif menyatakan setuju, bangga, serta sangat mendukung penuh program kesiswaan ini karena dinilai efektif melatih anak mereka menjadi lebih disiplin dan taat pada agama.

Karakteristik Agen Pelaksana (*Characteristics of the Implementing Organization*)

Variabel keempat dalam model implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn membedah dimensi internal lembaga penyelenggara yang mencakup pilar Karakteristik Agen Pelaksana (*Characteristics of the Implementing Organization*) (Situmorang, 2016, hlm. 190). Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa struktur organisasi, pembagian kerja, derajat kompleksitas birokrasi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang baku bertindak sebagai wadah penentu kelancaran program di tingkat tapak. Sehebat apa pun standar dirumuskan, penegakan aturan di lapangan berisiko mengalami kelumpuhan administrasi jika wadah birokrasi yang menjalankannya mengalami fragmentasi organisasi yang kaku, lambat, atau terperangkap dalam ego sektoral kedinasan. Oleh karena itu, karakteristik agen pelaksana dituntut memiliki kelenturan birokrasi, kejelasan rantai

komando, serta ketegasan fungsi kontrol harian terhadap kepatuhan kelompok sasaran (Maulana & Mulyono, 2019, hlm. 42).

Temuan empiris di lapangan membuktikan bahwa SMK Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan telah melahirkan inovasi tata kelola kelembagaan yang lincah melalui pembentukan tim pelaksana gabungan khusus yang disebut Satgas Keagamaan. Mesin penggerak internal ini dilegalkan secara kuat melalui payung hukum Surat Keputusan (SK) tertulis resmi yang diterbitkan langsung oleh Kepala Sekolah guna memotong rantai birokrasi yang lambat (Wahab, 2016, hlm. 195). Struktur tim gabungan ini disusun secara hierarkis-kolektif dengan menempatkan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama, Wakil Kepala Sekolah sebagai koordinator program, serta mengikat peran aktif rumpun guru PAI, guru Bimbingan Konseling (BK), wali kelas, hingga pembina kesiswaan Rohis. Alur koordinasi birokrasi internal ini dinilai berjalan sangat efisien, cair, dan teratur tanpa sekat organisasi yang kaku, sehingga mempermudah jalannya fungsi pengawasan berkala program keagamaan.

Pembagian wewenang (*division of labor*) di dalam struktur Satgas Keagamaan diatur secara rinci berdasarkan prinsip kolaborasi lintas sektor yang saling melengkapi tugas pokok satu sama lain. Berdasarkan draf pembagian tugas yang baku, guru PAI memegang kendali atas penguatan substansi materi keagamaan di kelas serta mengevaluasi ketuntasan capaian nilai sikap spiritual siswa per-semester menggunakan range parameter nilai skala kuantitatif 1-10. Wali Kelas mengemban tugas administratif untuk membina karakter kelas harian, memantau draf kartu amalan ibadah, mengontrol disiplin busana syariah, serta membagikan dokumentasi berkala hasil monitoring kepada orang tua siswa via WhatsApp. Sementara Guru BK bertindak sebagai unit layanan bimbingan klinis-psikologis personal bagi peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran moral berat (Ananda, 2023, hlm. 76.

Selanjutnya, kemapanan karakteristik organisasi ini diperkuat oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) harian wajib yang dijalankan secara mekanis berdasarkan draf tertulis kedinasan sekolah. Guna mengatasi kompleksitas pembiasaan siswa, sekolah mengerahkan gerakan pengawasan total, di mana seluruh dewan guru (termasuk guru mata pelajaran umum dan produktif kejuruan) berkomitmen aktif mendampingi aktivitas shalat berjamaah fardhu dan shalat dhuha bersama di sekolah, serta bertugas mengontrol barisan saf peserta didik yang tidak khusyuk. Aktivitas penegakan tata tertib dijalankan sangat tegas, di mana guru piket harian memanfaatkan corong mikrofon pengeras suara dari ruang piket untuk memanggil setiap kelas secara menyeluruh agar segera bergerak menuju tempat ibadah tepat waktu. Penataan struktur birokrasi gabungan yang disiplin inilah yang berhasil memotong potensi kesenjangan dalam memahami aturan kesiswaan, menjaga marwah sekolah, serta sukses memicu kesadaran spiritual yang mandiri pada diri peserta didik (Suparno, 2017, hlm. 64).

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (*Economic, Social, and Political Conditions*)

Variabel kelima dalam kerangka berpikir Donald Van Meter dan Carl Van Horn menegaskan bahwa ekosistem luar yang melingkupi suatu instansi secara konstan

akan memengaruhi, mendikte, sekaligus menguji daya tahan dari penegakan aturan formal di lapangan (Subianto, 2020, hlm. 122). Van Meter dan Van Horn berasumsi bahwa sebuah kebijakan publik tidak pernah dieksekusi di dalam ruang hampa udara sosiologis. Dinamika ekonomi, struktur hubungan pergaulan masyarakat sekitar, serta tingkat penetrasi teknologi digital luar dapat bertindak sebagai stimulus yang mempercepat pencapaian target, atau sebaliknya menjelma sebagai hambatan moral ekstrem yang mereduksi efektivitas tata tertib. Di SMK Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan, pemenuhan penanaman karakter religius dihadapkan pada karakteristik kondisi lingkungan urban metropolitan yang sangat kompleks, heterogen, serta dinamis.

Menakar dimensi sosial-ekonomi masyarakat, hasil pelacakan dokumen profil kesiswaan dan triangulasi data membuktikan bahwa karakteristik latar belakang ekonomi keluarga peserta didik mayoritas berada pada klaster kalangan menengah hingga menengah ke bawah. Kenyataan sosiologis ini berkaitan erat dengan pola asuh keluarga, di mana akibat himpitan ekonomi, sebagian besar orang tua siswa disibukkan oleh rutinitas mencari nafkah di berbagai sektor dengan jam kerja yang padat (Yayuk & Haqqi, 2023, hlm. 90). Kondisi tersebut memicu minimnya durasi kontrol serta kendornya pengawasan ibadah mandiri anak saat berada di rumah. Kurangnya kontrol rumah ini membuka celah masuknya kerentanan perilaku kesiswaan akibat pengaruh buruk dari ekosistem luar sekolah, di mana ditemukan risiko pergaulan bebas per-kelompok sebaya (*peer group*) remaja putus sekolah di sekitar wilayah Jakarta Selatan yang memicu keinginan membolos ibadah (Suradi, 2022, hlm. 91).

Faktor ekologis eksternal yang bergerak paling agresif dalam menantang konsistensi penegakan moral siswa di sekolah adalah tingkat kemajuan teknologi informasi dan tren media sosial kontemporer saat ini. Seluruh informan guru dan perwakilan kelompok sasaran sepakat mengakui bahwa tren digital saat ini membawa dampak yang dapat memicu kecanduan gawai (*handphone*) pada diri anak. Gempuran konten digital inilah yang ditengarai menjadi akar kendala pribadi terbesar dewan guru tahun-tahun belakangan ini, di mana siswa-siswi menjadi jauh lebih susah diatur akibat timbulnya krisis tata krama, pergeseran mentalitas, serta menipisnya rasa hormat kepada figur pendidik (Zubaidi dkk., 2022, hlm. 120). Imbas fluktuasi batin tersebut memicu bias afektif pada tahapan awal, di mana pelaksanaan shalat dhuha bersama adakalanya masih dihinggapi rasa malas sehingga siswa memandang ibadah sebatas formalitas menggugurkan kewajiban administratif kesiswaan.

Terlepas dari beratnya hambatan eksternal urban tersebut, sekolah berhasil membalikkan tekanan ekologis menjadi draf stimulus positif melalui jalinan pengawasan politik hukum yang kondusif dari pihak internal Yayasan serta penguatan pembinaan regulatif Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Mas'ud, 2022, hlm. 134). Pihak Yayasan bertindak sebagai penyokong utama yang aktif memberikan arahan kebijakan strategis, dukungan pengembangan program jangka panjang, serta pemenuhan prasarana fisik sekolah. Sementara itu, instansi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan pembinaan melalui regulasi dan supervisi

peningkatan mutu, yang bertindak sebagai penguat hukum bagi sekolah untuk menjalankan program secara berkelanjutan karena terbukti efektif menyukseskan Profil Pelajar Pancasila (P5) kurikulum nasional. Usaha kerja di lingkungan yang padu bersama orang tua lewat grup WhatsApp ini sukses meredam gangguan luar sekolah, sehingga melahirkan perubahan perilaku nyata yang positif dan evolusi daya tanggap batin siswa untuk beribadah atas kesadaran sendiri.

Disposisi atau Sikap Mental Pelaksana (*Dispositions of Implementors*)

Variabel muara dalam kerangka pemikiran Donald Van Meter dan Carl Van Horn menegaskan bahwa kesuksesan hilir suatu program pada akhirnya akan sangat bergantung pada kognisi, pemahaman, tingkat penerimaan, serta komitmen batin nyata (disposisi) dari para aktor pelaksana di lapangan (Solichin Abdul Wahab, 2016, hlm. 202). Van Meter dan Van Horn berasumsi bahwa secanggih apa pun aturan dirancang, sejelas apa pun isi SOP tertulis, dan semelimpah apa pun alokasi sumber daya anggaran yang dikerahkan, program akan mengalami kelumpuhan jika para implementor bersikap apatis atau menolak substansi regulasi. Aparat yang memiliki tingkat disposisi yang matang tidak akan bertindak pasif atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif formalitas, melainkan bersedia menggunakan hak diskresi persuasif secara total demi membumikan esensi tujuan kebijakan di tingkat bawah. Di SMK Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan, pemenuhan variabel moralitas ini dinilai berada pada level komitmen spiritual yang sangat tinggi, dikelola melalui keteladan tindakan nyata (*uswah hasanah*) dan pembinaan personal untuk mengikis potensi apatisme dewan guru.

Temuan empiris di lapangan membuktikan bahwa pimpinan tertinggi sekolah menampilkan tingkat komitmen pribadi dan disposisi yang amat sangat tinggi dalam mengawal ketercapaian visi religius satuan pendidikan. Kepala Sekolah memegang landasan argumen dan pembenaran rasional bahwa kepemimpinan lembaga pendidikan Islam wajib bersandarkan pada kekuatan contoh perilaku sehari-hari, bukan retorika lisan semata. Komitmen tersebut dibuktikan secara konsisten melalui kehadiran fisik pimpinan untuk terlibat langsung mendampingi, ikut melaksanakan shalat dhuha/zuhur berjamaah fardhu, serta memimpin tadarus pagi bersama siswa di sekolah. Wujud komitmen yang tinggi ini juga tecermin ketika pimpinan dihadapkan pada tantangan manajerial berupa adanya oknum staf atau guru non-PAI yang kurang mendukung jalannya program pembiasaan; pimpinan segera mengambil tindakan responsif melalui mekanisme koordinasi satu pintu berupa komunikasi klarifikasi langsung dan pembinaan personal secara tertutup demi menyamakan kembali persepsi dewan guru. Langkah tegas pimpinan ini melahirkan keputusan tunggal yang wajib dipatuhi bersama, sehingga seluruh pendidik tetap menampilkan sikap satu suara dan konsisten di depan siswa.

Sikap penerimaan yang kuat dan keteladanan pimpinan ini menular secara linear kepada dewan guru PAI yang menyatakan disposisi mereka yang amat sangat mendukung seluruh regulasi keagamaan sekolah karena memandang aturan tersebut merupakan panduan penting yang berharga bagi pembentukan kepribadian islami peserta didik. Motivasi terbesar para pendidik dipicu oleh nilai luhur teologis, yakni

keinginan tulus untuk terus mengajak murid dalam kebaikan agar taat kepada Allah SWT (Tresiana, 2021, hlm. 104). Manifestasi dari tingginya komitmen guru PAI dibuktikan melalui ketelatenan mereka dalam memanfaatkan hak diskresi mengajar untuk memberikan bimbingan batin khusus atau matrikulasi dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) bagi kelompok siswa baru yang kemampuan literasi mengajinya masih sangat kurang. Komitmen kolektif ini menyatu dalam satu frekuensi pembenaran moral yang sama dengan seluruh dewan guru mata pelajaran umum dan produktif kejuruan yang kompak memelihara budaya saling mengingatkan di ruang guru, serta aktif membantu mengawasi, mendampingi, bahkan bertugas memantau barisan saf siswa dimasjid agar suasana tetap khidmat.

Perpaduan usaha kerja disposisi pelaksana yang andal dan konsisten ini ditransmisikan lewat aktivitas penegakan sanksi kesiswaan harian yang dijalankan secara tegas namun mendidik dari ruang piket sekolah, tanpa adanya tindakan kekerasan fisik. Bagi siswa yang terbukti melanggar aturan ibadah, guru piket menjatuhkan hukuman moral langsung berupa penugasan menulis surat Yasin atau surah Al-Baqarah memanfaatkan pengeras suara. Ketegasan kolektif yang didukung penuh oleh antusiasme orang tua murid melalui grup WhatsApp ini pada akhirnya sukses melunakkan resistensi batin kelompok sasaran (*target group*). Hasil wawancara mengonfirmasi terjadinya evolusi spiritual yang matang pada diri objek kebijakan; para peserta didik secara jujur menegaskan bahwa mereka kini menjalankan rangkaian pembiasaan ibadah di sekolah atas dasar kesadaran diri sendiri karena memandang ibadah adalah kewajiban mutlak, bukan karena didorong rasa takut dihukum kesiswaan. Internalisasi nilai ini mencapai level keberlanjutan program yang solid, terbukti dengan konsistensi siswa yang secara sukarela tetap istiqamah menjaga pembiasaan shalat tepat waktu, bersedekah, membantu orang lain, dan tadarus Al-Qur'an secara mandiri di rumah meskipun sedang libur sekolah. (Harahap, 2025, hlm. 430)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembedahan data kualitatif menggunakan matriks Donald Van Meter dan Carl Van Horn, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin inti:

A. Penyelarasan Standar & Visi Vokasi: SMK Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan telah berhasil memformulasikan standar dan sasaran kebijakan penanaman karakter religius secara transparan di dalam dokumen KOSP dan RKS (Situmorang, 2016, hlm. 195). Penyelarasan visi keagamaan lokal sekolah ke dalam kerangka Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) nasional berhasil dikonversi secara eksplisit menjadi draf etika profesi kejuruan *(soft skills)* guna mencetak draf lulusan SMK yang memiliki integritas moral tinggi yang siap diserap oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (Satispi & Mufidayaiti, 2019, hlm. 165).
B. Efisiensi Birokrasi & Kemitraan Inklusif: Karakteristik organisasi pelaksana didesain lincah melalui pembentukan Satgas Keagamaan gabungan berbasis SK Kepala Sekolah untuk memotong fragmentasi birokrasi, ditunjang jaringan komunikasi masif multisaluran dan keterbukaan informasi digital WhatsApp bersama Komite Sekolah dan paguyuban orang tua murid (Maulana & Mulyono,

2019, hlm. 50; Satispi & Taufiqurokhman, 2018, hlm. 121). Pembagian kerja lintas sektor diatur solid kolaboratif (guru PAI nilai skala 1-10, wali kelas amalan kelas, guru BK bimbingan klinis moral).

C. Identifikasi Kendala Logistik: Hasil evaluasi mendeteksi adanya keterbatasan kapasitas logistik material di tingkat akar rumput, meliputi ukuran kapasitas tempat wudhu khusus perempuan (memicu antrean panjang), serta draf penganggaran keuangan keagamaan dalam dokumen RKAS sekolah yang baru mencover sebesar 70% dari kebutuhan operasional, sehingga memaksa pelaksana menyiasati sisa 30% defisit anggaran secara swadaya lewat pemanfaatan subsidi kotak uang amal Jum'at siswa (Alamsyah, 2016, hlm. 94).

D. Evolusi Kesadaran Spiritual Kelompok Sasaran: Meskipun dihadapkan pada hambatan kondisi lingkungan eksternal urban berupa kesibukan ekonomi orang tua siswa menengah ke bawah dan dampak destruktif kemajuan teknologi gawai yang memicu krisis adab remaja kota, roda kebijakan pembiasaan ibadah rutin massal harian tetap berjalan stabil (Yayuk & Haqqi, 2023, hlm. 95). Hal ini dikunci oleh tingginya komitmen disposisi guru PAI yang didorong motivasi teologis serta kekuatan keteladanan tindakan nyata (*uswah hasanah*) Kepala Sekolah yang konsisten hadir pada kegiatan-kegiatan kegamaan termasuk shalat berjamaah di sekolah (Mas'ud, 2022, hlm. 140).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mukhyie, M. (2023). *Metodologi Penelitian*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.

Ananda, R. (2023). *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*. Tasikmalaya: Bumi Aksara.

Andriani, S., dkk. (2021). *Karakter Religius*. Pasuruan: CV. Qiara Media.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Azani, A., dkk. (2024). Hakikat Belajar dan Pembelajaran. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2 (3).

Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (3).

Harahap, N. M. (2025). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan*, 2 (2).

Hardani, dkk. (2020). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.

Joharsah, M. (2023). Pembinaan Karakter Mental Dalam Nilai Religius Eks Pengguna Narkotika Untuk Mempercepat Proses Penyembuhan Di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi. *Wahana Jurnal Pengabdian Keagamaan Masyarakat*, 2 (1).

Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.

Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.

Magdalina, I., dkk. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III SDN Sindangsari III. *Pandawa: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 3 (1).

Maulana, D., & Mulyono, A. (2019). *Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*. Serang: CV. A.A. Rizky.

Mas'ud, M. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kecamatan Soreng Kota Parepare*. Makassar: Citra Multi Persada.

Pakpahan, A. F. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.

Rantung, M. I. R. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Sukoharjo: Tahta Media Group.

Saputra, D., dkk. (2021). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Di Masa Pandemi Covid-19 (Di SMA Negeri 1 Ketungau Hilir). *Jurnal Alumni Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIS Sambas*, 4 (2).

Sari, A., dkk. (2023). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi.

Sartika Septi Budi, dkk. (2022). *Buku Ajar Belajar dan Pembelajaran*. Sidoarjo: Umsida Press.

Satispi, E., & Taufiqurokhman. (2018). *Design Dalam Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: UMJ Press.

Satispi, E., & Mufidayaiti, K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: UMJ Press.

Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik: Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Depok: Social Security Development Institute.

Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.

Suradi. (2022). *Pendidikan Islam dan Multikultural*. Surabaya: Pustaka Aksara.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant PT. Menuju Insan Cemerlang.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit UNPAD.

Tresiana, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*. Yogyakarta: Suluh Media.

Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yayuk, E., & Haqqi, Y. A. (2023). *Kompetensi dan Kinerja Guru Serta Faktor yang Mempengaruhinya*. Malang: Haqqi Internasional Edukasi Publisher.

Zubaidi, A., dkk. (2022). *Imajinasi Dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam*. Trenggalek: Penerbit Indonesia Imaji.